

PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA KEPEMIMPINAN UMAR BIN ABDUL AZIS

Nana Audina

Prodi Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
<nana.audina95@gmail.com>

Raihan

Prodi Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
<raihan.fdkmd@gmail.com>

Abstrak: Khalifah Umar Bin Abdul Aziz merupakan khalifah kedelapan dari empat belas khalifah yang memimpin Bani Umayyah. Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz dinilai berhasil dalam menerapkan prinsip *good governance* menjadi fenomena menarik untuk di kaji saat ini. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dalam bidang studi ilmu *leadership* Islam. Data primer dalam penelitian ini adalah dua buku tentang Umar bin Abdul Aziz yang ditulis oleh Ali Muhammad Ash-Shallabi dengan judul “*Biografi Umar bin Abdul Aziz*” dan “*Umar bin Abdul Aziz Pembaharu dari Bani Umayyah*”. Sedangkan yang menjadi data sekunder diperoleh dari bahan bacaan dan referensi-referensi lain terkait dengan tema penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, mengidentifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang terkait dengan tema kajian ini. Sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah Dinasti Umayyah yang berusaha menghidupkan kembali ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Di dalam sistem kepemimpinannya, Umar berusaha mengangkat gubernur yang terpercaya, membuat perencanaan dan tujuan yang jelas serta melakukan pengawasan terhadap jalannya roda kepemimpinannya. Di antara upaya Umar dalam menjalankan *good governance* terlihat dalam praktik-praktik kepemimpinan yang dilakukannya seperti menegakkan keadilan, menjalankan prinsip musyawarah, mempraktikkan prinsip persamaan derajat, menerapkan prinsip kebebasan dan bertanggung jawab terhadap kekuasaan yang dipikulnya. Prinsip-prinsip tersebut telah mampu membawa kehidupan kaum muslimin kepada pembaharuan.

Kata Kunci: *Good Governance*, Kepemimpinan, Umar Bin Abdul Aziz.

Abstract: *Caliph Umar Bin Abdul Aziz was the eighth caliph of the fourteen caliphs who led the Umayyads. The leadership of Umar Bin Abdul Azis was considered successful in applying the principles of good governance to be an interesting phenomenon to be studied at this time. This study is expected to contribute to scientific thought in the field of Islamic leadership science. The primary data in this study is a book about Umar bin Abdul Aziz written by Ali Muhammad Ash-Shallabi under the title "Biography of Umar bin Abdul Aziz". Whereas secondary data is obtained from reading material and other references related to the theme of this research. Data collection is done by studying documentation, identifying discourses from books, papers or articles, magazines, journals, web (internet), or other information related to the theme of this study. While the data analysis techniques are carried out qualitatively and are described in descriptive form. The results showed that Umar bin Abdul Aziz was an Umayyad Caliph who sought to revive Islamic teachings in the midst of society. In his leadership system, Umar tried to appoint a trusted governor, make clear plans and goals and supervise the running of his leadership wheels. Among Umar's efforts in carrying out good governance can be seen in the practices of leadership that he did such as enforcing justice, implementing the principle of deliberation, practicing the principle of equality, applying the principle of freedom and being responsible for the power he carried. These principles have been able to bring the lives of the Muslims to renewal.*

Keywords: *Good Governance, Leadership, Umar Bin Abdul Azis.*

PENDAHULUAN

Hubungan antara prinsip *good governance* dengan kepemimpinan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Islam sebagai sebuah agama yang mendatangkan rahmat bagi seluruh manusia menempatkan pemimpin sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan.¹ Sebaliknya, keberhasilan sebuah negara erat kaitan dengan tokoh pemimpinnya. Salah satu yang menjadi indikator keberhasilan kepemimpinan dalam pemerintahan dapat dilihat dari terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang diterapkan oleh

¹Lihat Surah Al Baqarah ayat 30. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kepemimpinan terdiri atas empat unsur, yaitu: (1) Pemimpin, yang disebut dengan khalifah; (2) Wilayah kepemimpinan, sebagaimana disebut dalam ayat di atas dengan *Al-Ardh* (muka bumi); (3) Hubungan antara pemimpin, yang tersirat dari kalimat *Ataj'alu fiha manyufsidu fiha* (mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu); (4) Pengangkatan pemimpin, tersirat dari kalimat *Inni ja'il* (Sesungguhnya aku hendak menjadikan. Lebih jauh, lihat: Yunasril Ali, *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Angkasa, 2008), hal. 115.

pemimpin negara tersebut. Kepemimpinan yang menerapkan prinsip *good governance* ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. yang berhasil dalam memajukan kepemimpinan Islam di Madinah. Sistem kepemimpinan yang *good governance* ini juga kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan *khulafaurrasyidin*.

Dinasti Bani Umayyah merupakan sebuah pemerintahan Islam yang berdiri setelah pemerintahan *khulafaurrasyidin*. Pada masa itu, terjadi perubahan sistem kepemimpinan, dari yang sebelumnya bersifat *syura* berubah menjadi monarki. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama kurang lebih 90 tahun (661-750 M). Adapun khalifah yang di nilai sukses dalam menjalankan kepemimpinan *good governance* pada masa itu adalah Umar bin Abdul Aziz.

Khalifah Umar Bin Abdul Aziz merupakan khalifah yang kedelapan dari empat belas khalifah² yang memimpin Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun (99-101 H/717-719 M) atau lebih tepatnya dua tahun lima bulan. Dalam kepemimpinan yang sangat singkat ini, perubahan yang ia lakukan sangat signifikan dampaknya. Berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh khalifah-khalifah Bani Umayyah sebelumnya, Umar Bin Abdul Azis berusaha memperbaiki segala tatanan yang ada di masa kekhalifahannya, seperti menaikkan gaji para gubernurnya, pemeratakan kemakmuran dengan memberi santunan kepada fakir miskin, dan memperbarui dinas pos. Bahkan ia juga menyamakan kedudukan orang-orang Non-Arab sebagai warga negara kelas dua dengan orang-orang Arab dan mengurangi beban pajak dan menghentikan pembayaran *jizyah* bagi orang Islam baru.³

Umar bin Abdul Azis memberikan hak untuk bagi umat Muslim, baik yang berasal dari Muslim Arab maupun non-Arab ikut berperan aktif di dalam *diwan-diwan* pada masa pemerintahannya. Ia juga memberlakukan prinsip baru dalam sistem perpajakan yang didasarkan atas asas persamaan antara Muslim Arab dan Muslim Non-Arab, baik berupa pajak jiwa maupun pajak tanah.

² Secara lengkap, urutan khalifah Bani Umayyah adalah sebagai berikut: 1) Muawwiyah bin Abi Sufyan (41-60H/661-679M); 2) Yazid bin Muawwiyah (60-64H/679-683M); 3) Muawwiyah bin Yazid (64H/683M); 4. Marwan bin Hakam (64-65H/683-684M); 5) Abdul Malik bin Marwan (65-86H/684-705M); 6) Al-Walid bin Abdul Malik (86-96H/705-714M); 7) Sulaiman bin Abdul Malik (69-99H/714-717M); 8) Umar bin Abdul Aziz (99-101H/717-719M); 9) Yazid bin Abdul Malik (101-105H/719-723M); 10) Hisyam bin Abdul Malik (105-125H/723-742M); 11) Al-Walid bin Yazid II (125-126H/742-743M); 12) Yazid bin Walid bin Malik (126H/743M); 13) Ibrahim bin Al-Walid II (126-127H/743-744M); 14) Marwan bin Muhammad (127-132H/744-750M).

³Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 128.

Khalifah Umar menetapkan bahwa pajak bukan sebuah fungsi dari status individual. Muslim Non-Arab diharapkan membayar pajak tanah, dan demikian pula Muslim Arab harus membayar pajak tanah-tanah mereka secara penuh, dan menghapuskan pertentangan antara masyarakat Arab dan masyarakat non-Arab.⁴

Kepemimpinan Umar Bin Abdul Azis dinilai berhasil dalam menerapkan prinsip *good governance* menjadi fenomena menarik untuk di kaji saat ini dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dalam bidang studi ilmu kepemimpinan Islam, terutama dalam memberikan pemahaman tentang kepemimpinan yang baik, khususnya dalam bidang pemerintahan.

KERANGKA TEORITIS

1. Konsep *Good Governance*

Secara bahasa, kata “*good*” berarti baik dan dalam istilah pemerintahan mengandung dua pemahaman. Pemahaman *pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Pemahaman *kedua*, aspek-aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan.⁵

Sedangkan “*governance*” secara istilah adalah proses pengambilan keputusan dan proses bagaimana sebuah keputusan diimplementasikan. *Good governance* diartikan sebagai *governance* yang baik. *Governance* dapat digunakan dalam berbagai konteks, di antaranya: *coorporate governance, government governance, international governance, nasional governance dan local governance*.⁶ Secara umum istilah *good governance* memiliki pengertian segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam konteks ini, pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah (lembaga swadaya masyarakat).⁷

⁴Fahsin M. Fa'al, *Sejarah Kekuasaan Islam*, (Jakarta Barat: Artha Rivera, 2008), hal. 21.

⁵Sunaryo, *Implementasi Good Governance dan Clean Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, (Jakarta: IRJEN DEPAG RI, 2007), hal. 72.

⁶Dwi Martini, *Konsep, Strategi dan Implementasi Good governance dalam Pemerintahan*, (Jakarta: IRJEN DEPAG RI, 2007), hal. 4-5.

⁷Komaruddin Hidayat, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Cet III, (Jakarta: ICCE, 2007), hal. 216.

Dalam perspektif Islam, elemen-elemen pemerintahan yang *baik* (*good governance*) secara normatif haruslah berangkat dari beberapa landasan antara lain:⁸

Pertama, syura atau musyawarah. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang menjadi wahana di mana pengambilan keputusan dilakukan melalui partisipasi terbuka. Secara eksplisit ditegaskan dalam Alquran, bahwa terdapat dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah.⁹ Landasan ini sebagaimana disebutkan dalam Surah As-Syura ayat 38, yang artinya: “*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka*”.

Kedua, *al-'adl* atau keadilan. Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam pemerintahan yang baik. Baik itu dalam konteks hukum atau dalam kerangka membangun pemerataan sumber-sumber ekonomi-politik. Prinsip moral ini bersikap tegas pada anti kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah Swt. dalam beberapa ayat-Nya, diantaranya dalam Surah An-Nahl ayat 90 yang berarti: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Ketiga, *al-musawah* atau egaliterianisme (persamaan), yakni semua elemen dalam masyarakat sama haknya sebagai warga negara dan diperlakukan yang sama pula dalam hak-haknya untuk hidup. Tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Sebagaimana dalam Alquran Surah Al-Hujurat ayat 13: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”.

⁸Ali Nurdin, *Qur'anic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur'an*. (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006), hal. 225.

⁹Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 111.

Elemen pemerintahan yang baik dalam Islam yang *keempat* adalah *Al-Masuliyah* atau tanggung jawab. Terkait ini, kekuasaan adalah suatu karunia dan nikmat Allah yang merupakan amanah kepada manusia untuk dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya, perkataan amanah tercantum di dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Kelima adalah *al-Hurriyah* adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengeksperimentasikan pendapatnya, asalkan dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebagaimana dalam Alquran Surah Ali-Imran ayat 114: "Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang *ma'ruf*, dan mencegah dari yang *Munkar* dan bergegas kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu Termasuk orang-orang yang saleh".

2. Konsep Kepemimpinan Islam

Urgensi pemimpin dalam komunitas muslim merupakan suatu keniscayaan. Rasulullah mengingatkan dalam batas dan wilayah yang sangat kecil sekalipun pemimpin itu sudah harus diadakan sebagaimana sabda beliau, "Jika kamu bertiga maka pilihlah salah seorang sebagai pemimpin". Hadis ini mengisyaratkan bahwa jika dalam perjalanan saja perlu pemimpin, apalagi dalam komunitas yang jumlahnya relatif besar, seperti masyarakat dan negara.¹⁰

Terdapat beberapa penyebab timbulnya pemimpin dalam perkembangan masyarakat, yaitu sebagai polarisasi dari anggota-anggota kelompok; sebagai pencerminan kemampuan seseorang dan sebagai jawaban dari faktor-faktor kondisional dan situasional.¹¹

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan resume dari penelitian perpustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan sejarah. Data primer dalam penelitian ini adalah buku tentang Umar bin Abdul Aziz yang ditulis oleh Ali Muhammad Ash-Shallabi dengan judul "Biografi Umar bin Abdul Aziz". Sedangkan yang menjadi data sekunder diperoleh dari bahan bacaan dan

¹⁰RB. Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2005), hal. 86.

¹¹ RB. Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam...*, hal. 16.

referensi-referensi lain terkait dengan tema penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, mengidentifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang terkait dengan tema kajian ini. Sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz

a. Riwayat Hidup Umar bin Abdul Aziz

Khalifah Umar bin Abdul Aziz nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abi Al-Ash bin Umayyah bin Abdisyams bin Abdil Manaf. Gelarnya adalah Al-Imam Al-Hafizh Al-Allamah Al-Mujtahid Az-Zahid Al-‘Abid As-Sayyid Amirul Mukminin Haqqan, Abu Hafsh Al-Qurasyi Al-Umawi Al-Madani Kemudian Al-Mishri, Al-Khalifah Az-Zahid Ar-Rasyid Asyajj Bani Umayyah.¹²

Umar lahir di Madinah pada tahun 61 Hijriah.¹³ Imam Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa dia dilahirkan di Madinah pada masa kepemimpinan Yazid.¹⁴ Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam yaitu salah satu gubernur terbaik Bani Umayyah yang pemberani dan dermawan. Ibunya bernama Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin Al-Khattab.¹⁵

Umar memiliki akhlak yang baik dan wajah yang tampan, memiliki akal yang sempurna, kepribadian yang baik, pandai berpolitik, selalu berusaha untuk terus bersikap adil, berpengetahuan luas, memahami ilmu psikologi, cerdas, ahli tobat, tunduk kepada Allah, tidak gila jabatan, selalu mengungkapkan kebenaran. Dia dicatat sebagai salah satu pemimpin dan ulama ideal pada masa Bani Ummayyah dan dikenal sebagai seorang yang sangat fasih dan lancar dalam berbicara. Namun hidupnya tidak berlangsung lama. Ia meninggal dunia pada tahun 101 H dalam usia empat puluh tahun.¹⁶

b. Karakteristik Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz dinilai sebagai khalifah Bani Umayyah memiliki kepribadian pemimpin *rabbani*. Sifat-sifat tersebut membentuk karakter tersendiri

¹²Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, terj. Chep. M. Faqih FR., (Jakarta: Beirut, 2014), hal. 1.

¹³Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz Pembaharu dari Bani Umayyah*, terj. Shoufau Qolbi, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2010), hal. 11.

¹⁴Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hal. 4.

¹⁵Ali Muhammad Ash-shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hal. 3.

¹⁶Abdusyafi Muhammad Abdul Latif, *Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*, terj. Masturi Irham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hal. 282.

dalam kepemimpinannya. Di antara karakteristik kepemimpinan Umar dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Sangat takut kepada Allah
Umar bin Abdul Aziz memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai godaan materi, popularitas, kekuasaan serta nafsu yang melenakannya. Dengan adanya sifat ini, Umar menyadari bahwa kekuasaan bersifat sementara dan akhirat bagi seorang muslim lebih penting dari dunia. Karena rasa takutnya teramat sangat kepada Allah, Umar bin Abdul Aziz cepat menangis dan mengeluarkan air mata.
- 2) *Zuhud* (Sederhana)
Umar bin Abdul Aziz dapat memahami bahwa dunia ini adalah negeri yang penuh cobaan dan ujian serta ladang untuk kehidupan akhirat. Oleh karena itu, dia membebaskan dirinya dari pengaruh dunia dengan segala keindahannya, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, tidak merasa senang dengan apa yang ada (kekhalfahan), dan tidak bersedih akan sesuatu yang telah hilang dari perkara-perkara duniawi.
- 3) Rendah Hati
Sifat terpuji ini merupakan salah satu sifat utama yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz. *Zuhud* telah membawanya untuk bersikap rendah hati, karena syarat *zuhud* yang sebenarnya adalah rendah hati terhadap Allah. Ia adalah seorang khalifah yang tidak suka bila dipanggil dengan sebutan “wahai khalifah Allah di bumi” dan senang bila dipanggil dengan sebutan Umar saja.
- 4) Wara'
Umar bin Abdul Aziz selalu bersifat wara' (berhati-hati), khususnya terhadap perkara yang haram dan syubhat.
- 5) Lemah lembut dan Pemaaf
Di antara sifat yang dimiliki Umar bin Abdul Aziz adalah lemah lembut dan pemaaf. Diriwayatkan bahwa ada laki-laki yang mencela Umar bin Abdul Aziz, namun dia tidak membalasnya.
- 6) Sabar
Kesabaran terbesar yang ditanggung Umar dalam kehidupannya adalah kekhalfahannya.
- 7) Tegas
Ketegasan Umar Bin Abdul Azis tercermin dari keseriusannya dalam menangani berbagai perkara serta tidak menganggap sepele perkara yang dianggap penting bagi kemaslahatan umum dan kemaslahatan kaum muslimin.
- 8) Adil
Para ulama sepakat bahwa Umar bin Abdul Aziz merupakan salah seorang pemimpin yang adil, khalifah yang bijaksana dan imam yang lurus.

¹⁷Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hal. 70-83.

c. Proses Umar Bin Abdul Azis Menjadi Khalifah

Tidak seperti khalifah Bani Umayyah sebelumnya, ia bukan merupakan keturunan dari khalifah sebelumnya, tetapi ditunjuk langsung. Umar Bin Abdul Azis merupakan sepupu dari khalifah sebelumnya yang memerintah Bani Umayyah, yakni Sulaiman bin Abdul Malik.

Umar Bin Abdul Azis mengawali karir kepemimpinannya sebagai Wali Kota Madinah pada tahun 87 H yang diangkat oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik.¹⁸ Umar memerintah sebagai Wali Kota Madinah selama enam tahun, pada tahun 93 H, Al-Walid mencopot Umar bin Abdul Aziz dari jabatannya sebagai Wali Kota Madinah atas permintaan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi Gubernur Irak, yang mengadu kepada Al-Walid bahwa para pemberontak asal Irak meminta suaka kepada Umar.¹⁹

Umar bin Abdul Aziz pun kembali ke Syam dan tidak menduduki jabatan resmi apapun selama sisa era Al-Walid. Ketika Al-Walid meninggal dunia dan pada saat sepupunya yakni Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah pada 96 H-99 H, jadilah Umar orang terdekatnya dan pendukung utama sekaligus penasihatnya. Ia senantiasa menemaninya selama masa kepemimpinannya.²⁰ Ibnu Sirin berkata, “*Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Sulaiman yang telah memulai kekhalifahannya dengan menghidupkan shalat dan mengakhirinya dengan mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah*”. Sulaiman wafat pada 99 H dan Umar menshalatkan jenazahnya.²¹

d. Kemajuan Pada Masa Kepemimpinan Umar Bin Abdul Azis

Terdapat beberapa usaha yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz sewaktu menjadi Khalifah Bani Umayyah, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, di dalam bidang Agama, Umar bin Abdul Aziz menghidupkan kembali ajaran Alquran dan sunnah. Ia menjalin kerja sama dengan beberapa ulama besar, seperti Al-Hasan Al-Bashri dan Sulaiman bin Umar. Umar bin Abdul Aziz juga menerapkan syariah Islam dengan serius.²²

Kedua, dalam bidang politik Umar menerapkan politik yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan di atas segalanya. Mengirim utusan ke berbagai negeri untuk melihat langsung cara kerja gubernur dalam rangka

¹⁸Abdussuyafi Muhammad Abdul Latif, *Bangkit dan Runtuhnya*, hal. 215.

¹⁹Abdussuyafi Muhammad Abdul Latif, *Bangkit dan Runtuhnya*, hal. 216.

²⁰Abdussuyafi Muhammad Abdul Latif, *Bangkit dan Runtuhnya...*, hal. 217.

²¹Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hal. 27.

²²Abdurrahman bin Abdul Karim, *Kitab Sejarah Terlengkap Para Sahabat Nabi, Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in*, (Jember: Diva Press, 2014), hal. 543.

menegakkan kebenaran. Memecat gubernur yang tidak taat menjalankan agama dan bertindak zhalim terhadap rakyat.²³

Ketiga, dalam bidang ekonomi Umar mengurangi beban pajak. Membangun tanah pertanian, irigasi, pengairan sumur, pembuatan sumur-sumur dan pembangunan jalan raya, serta menyantuni fakir miskin dan anak yatim.²⁴

Keempat, Umar Bin Abdul Aziz juga mempunyai jasa dalam pengembangan masyarakat dan dakwah Islamiah, seperti menciptakan perdamaian yang dilandasi ajaran Islam; meningkatkan kesejahteraan rakyat; melindungi hak asasi manusia; menyusun undang-undang tentang pertahanan; membangun tanah pertanian beserta sistem pengairannya; membangun masjid-masjid sebagai syiar Islam; menyediakan dana khusus untuk menolong orang-orang miskin; serta melakukan pembukuan terhadap hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.²⁵

e. Sistem Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz

Untuk memuluskan jalannya roda kepemimpinan, pengayoman terhadap masyarakat, serta penerapan keadilan dan kebenaran, Umar bin Abdul Aziz mengangkat para gubernur yang terpercaya, terpilih dan terbaik. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang dapat mengemban amanah, berilmu, teguh, rendah hati, menjaga kesucian diri, adil, baik perilakunya, penyayang, menjadi tauladan yang baik, mau menerima pendapat orang lain, mau meminta nasehat dari orang yang lebih pandai, tidak egois, berkecukupan, cerdas dan bijaksana.²⁶

1) Perencanaan dalam Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz tidak pernah memutuskan permasalahan kecuali ia merencanakan terlebih dahulu, memperkirakan akibat yang akan terjadi kemudian mempertimbangkan dengan penuh perhitungan. Di dalam menyusun perencanaan, Umar selalu menentukan tujuan yang jelas, memilih kebijakan yang akan dibuat, menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh dan barulah melakukannya. Langkah pertama dalam perencanaan Umar adalah menentukan tujuan yang jelas. Tujuan utama yang ingin dicapainya adalah melakukan reformasi dan pembaharuan yang bijaksana sesuai dengan ketentuan nabi dan *khulafaurrasyidin*, serta melaksanakan unsur penunjang demi tercapainya tujuan utama tersebut. Misalnya menegakkan keadilan dan kebenaran, menghapus kezaliman, mengembalikan keharmonisan antara manusia dengan alam, serta keharmonisan

²³Abdurrahman bin Abdul Karim, *Kitab Sejarah Terlengkap Para Sahabat Nabi*, hal. 544.

²⁴Abdurrahman bin Abdul Karim, *Kitab Sejarah Terlengkap Para Sahabat Nabi*, hal. 544.

²⁵Abdurrahman bin Abdul Karim, *Kitab Sejarah Terlengkap Para Sahabat Nabi*, hal. 545.

²⁶Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hal. 343.

dengan Pencipta dari keduanya dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Islam.

Umar juga menjadikan kebijakan politik sebagai salah satu unsur penunjang perencanaan. Hal ini terlihat jelas dalam praktek perencanaan administrasi yang dilakukan dan keteguhannya untuk berpegang kepada ajaran Alquran dan sunnah. Serta penolakannya terhadap perdebatan yang terjadi dalam perkara syariat dan agama, karena posisinya sebagai pimpinan yang melaksanakan hukum. Berkaitan dengan membangun etos kerja, Umar telah menjelaskan bahwa dia adalah seorang pelaksana hukum bukan pembuat baru. Dia hanya ingin menegakkan ajaran agama dan menegakkan bahwa ketaatan itu hanya ditujukan terhadap orang yang taat kepada Allah. Semua tindakan dan kebijakan yang diambil harus didasarkan pada penegakan keadilan, melakukan perbaikan, menyebarkan kebaikan dan bukan menzalimi. Berbuat dosa dan menimbulkan permusuhan.²⁷

2) Struktur Pemerintahan pada Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz

Struktur pemerintahan pada masa kepemimpinan Umar di susun sesuai dengan perencanaan guna membangun segala kebutuhan serta melaksanakan setiap rencana yang menyangkut urusan birokrasi. Berikut ini adalah struktur pemerintahan pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz:

- a. Tingkat I, yaitu kepala negara (Khalifah Umar bin Abdul Aziz)
- b. Tingkat II, terdiri dari para penasihat dan pembantu khalifah, pemegang stempel negara, sekretaris negara, penerima tamu negara, pertahanan negara, dan kepolisian negara.
- c. Tingkat III, terdiri dari para pengurus *kharraj* dan tentara, percetakan uang emas dan perak, departemen pos, gubernur, pengurus *baitul mal* pusat, departemen pajak dan lembaga zakat dan sedekah.
- d. Tingkat IV, terdiri dari para hakim para mufti dan guru, sekretaris daerah, pengurus *kharraj* daerah, lembaga zakat dan sedekah daerah, departemen pos daerah, kepolisian daerah, pengurus perizinan serta lembaga urusan peperangan (jika diperlukan).²⁸

3) Pengawasan dalam Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz secara langsung mengawasi sendiri apa yang terjadi di dalam kepemimpinan yang dipimpinnya, dari persoalan yang kecil hingga persoalan yang besar. Dia selalu mengikuti perkembangan dari para pejabat dan pegawainya di daerah-daerah.²⁹ Umar banyak menggunakan waktunya untuk membuat rancangan kebijakan reformasi yang meliputi semua aspek kehidupan,

²⁷Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hal. 352.

²⁸Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hal. 353.

²⁹Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hal. 348.

mulai dari urusan agama, ekonomi, politik, administrasi, sosial dan lain sebagainya. Umar memerintahkan kepada para pemimpin daerah untuk menerapkan sistem tersebut di daerah masing-masing. Dia juga sering memberi arahan-arahan yang mendidik dengan mengingatkan mereka besarnya tanggung jawab yang mereka pikul di bahu mereka, mengingatkan mereka untuk takut kepada Allah, merasa selalu dalam pengawasan-Nya, dan selalu mendorong mereka untuk bertakwa kepada-Nya dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.³⁰ Pengawasan ketat yang dilakukan oleh Umar dan petunjuk yang mendetail yang diberikan kepada para pejabatnya, telah menciptakan kondisi yang stabil di seluruh wilayah.³¹

f. Peluang dan Tantangan Masa Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz

Di antara peluang-peluang pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah sebagai berikut:

1) Keterlibatan Para Ulama

Masa kepemimpinan Sulaiman bin Abdul Malik merupakan awal dari keterlibatan para ulama dalam mengemban tanggung jawab negara. Pada masa Umar bin Abdul Aziz keterlibatan para ulama dalam pelaksanaan urusan negara menjadi lebih kuat dan efektif. Mereka diberikan tanggung jawab yang lebih luas dan beraneka ragam bentuknya. Partisipasi ulama dalam mengemban tanggung jawab diperluas ke pelbagai urusan kenegaraan, sehingga mereka diberi pelbagai tugas dan jabatan. Keterlibatan ulama pada masa kepemimpinan Umar dapat dikatakan sebagai kepemimpinannya para ulama. Di dalam hal ini, kepemimpinan Umar adalah contoh kepemimpinan yang baik untuk sebuah negara Islam, dimana kekuatan legislatif dan eksekutif berjalan seiring membentuk kombinasi yang sempurna. Partisipasi ulama pada masa Umar sangat luas jangkauannya sehingga tidak ada tandingannya di masa Dinasti Umayyah.³²

2) Dukungan Para Ulama

Para ulama memiliki kontribusi dalam membantu Umar bin Abdul Aziz menjalankan perbaikan, mereka menolong dan membantunya dalam mengambil keputusan, bahkan sebagian dari mereka ikut dalam pengambilan keputusan.³³

³⁰Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hal. 349.

³¹Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hal. 350.

³²Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hal. 198-199.

³³Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hal. 200.

3) Banyaknya Nasihat Para Ulama

Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang paling banyak diberikan masukan dan nasihat di antara semua khalifah Bani Umayyah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya surat yang terkirim antara khalifah dan para ulama. Contohnya seperti Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khathab, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurahzi, Abu Hazim Salamah bin Dinar, Qasim bin Mukhaimarah, Hasan Al-Basri, dan lain-lain. Adapun nasihat yang mereka berikan kebanyakan terkait dengan metode kebijakan Umar dalam berpolitik. Salah satu bukti bahwa Umar bin Abdul Aziz menjalankan kepemimpinannya berdasarkan nasihat para ulama dapat dilihat dari isi nasihat dan siasat yang dijalankan dalam kesehariannya. Dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurahzi, "*Wahai Amirul Mukminin, bukalah pintumu untuk masyarakat, permudahlah birokrasi, belalah orang-orang yang terzalimi dan kembalikanlah harta mereka yang di ambil secara zalim kepada pemilik aslinya*".³⁴

4) Partisipasi Para Ulama

Partisipasi para ulama terhadap kinerja Umar bin Abdul Aziz tidak hanya sebatas memberi petunjuk dan nasehat, namun mereka juga bersedia untuk diberikan tanggung jawab memangku berbagai jabatan di dalam struktur kepemimpinan Umar. Posisi paling penting dan paling banyak memberi pengaruh terhadap politik adalah jabatan gubernur di berbagai wilayah dan kepala *Baitul Mal*. Partisipasi yang begitu besar dari para ulama untuk memimpin berbagai wilayah atau untuk mengurus *Baitul Mal* atau untuk pekerjaan lain telah memberikan pengaruh yang besar dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.³⁵

Adapun terkait tantangan yang dihadapi Umar bin Abdul Aziz pada masa kepemimpinannya, antara lain:

a) Terjadinya Pemberontakan

Terjadinya pemberontakan yang dipelopori Kaum Syiah. Diantaranya adalah pemberontakan Mukhtar di Kufah pada tahun 685-687 M. Mukhtar mendapat banyak pengikut dari kalangan kaum *mawali*, yaitu umat Islam bukan Arab yang pada masa Bani Umayyah dianggap sebagai warga kelas dua. Selain gerakan tersebut, gerakan-gerakan anarkis yang dilancarkan kelompok Khawarij dan Syiah juga dapat diredakan.³⁶

³⁴Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hal. 202.

³⁵Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hal. 204-204.

³⁶Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal. 46.

Adapun ketegasan Umar bin Abdul Aziz di dalam menyelesaikan pemberontakan, terutama terhadap orang yang ingin memecah belah persatuan kaum muslimin, Umar menggunakan metode dialog dan diskusi dengan mereka.³⁷ Sehingga hubungan pemerintah dengan oposisi membaik pada masa Umar bin Abdul Aziz. Meskipun kepemimpinannya yang singkat Umar berhasil menjalin hubungan yang baik dengan golongan Syiah dan menjadikan kedudukan Mawali disejajarkan dengan Muslim Arab.³⁸

2. *Praktek Good Governance Masa Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz*

Ali Muhammad Ash-Shallabi memaparkan, bahwa praktek *good governance* yang dijalankan pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

a. Mengangkat Gubernur yang Adil dan Terpercaya

Sebagian besar ulama menegaskan bahwa semua pejabat yang diangkat oleh Umar bin Abdul Aziz adalah orang-orang terpercaya, diantaranya adalah:³⁹

- 1) Al-Jarrah bin Abdillah Al-Hakami (Gubernur Khurasan dan Sinjistan) yang dikenal sebagai seorang pahlawan yang pemberani dan wibawa, taat beribadah dan menghafal Alquran.
- 2) Adi bin Artha'ah Al-Fazari (Gubernur Bashrah) yang dikenal sebagai salah seorang perawi hadits. Umar sering meminta berbagai nasihat dan masukan darinya.
- 3) Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khathab (Gubernur Kufah) dikenal sebagai seorang pemimpin yang terpercaya dan adil.
- 4) Umar bin Habirah (Gubernur Al-Jazirah) yang dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan pemberani.
- 5) Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm (Gubernur Madinah) adalah salah seorang ulama besar yang terpercaya.
- 6) Abdul Aziz bin Abdullah bin Usaid al-Umawi (Gubernur Mekkah) adalah seorang perawi hadits, bahkan dia dikategorikan sebagai perawi yang terpercaya oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Hibban.
- 7) Abdul Malik bin Rifa'ah bin Khalid bin Tsabit al-Fahmi (Gubernur Mesir), merupakan seorang yang memiliki catatan hidup yang baik, sederhana, dihormati, terpercaya, dan adil terhadap masyarakat.
- 8) Ismail bin Ubaidillah bin Abi al-Muhajir al-Makhzumi (Gubernur Maroko) adalah seorang dai yang salih, terhormat dan zuhud.
- 9) As-Samah bin Malik (Gubernur Andalusia) dikenal sebagai salah seorang pemimpin yang masyhur.

³⁷Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hal. 82.

³⁸Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, hal. 47.

³⁹Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hal. 344-346.

b. Mengedepankan Prinsip Musyawarah

Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan pelaksanaan prinsip musyawarah dalam kepemimpinannya. Ia senantiasa bertukar pikiran dengan bawahannya.⁴⁰

c. Pengelolaan administrasi yang tertib

Umar bin Abdul Aziz bertekad untuk mewujudkan kepemimpinan yang baik dan terhindar dari kekacauan Administrasi dengan berusaha mencegah setiap akses yang dapat meracuni administrasi, seperti pengkhianatan, kebohongan, pemborosan, penyuapan, pemberian hadiah untuk para pemimpin, keterlibatan para pejabat dalam perniagaan, ketertutupan para pejabat dari masyarakat, dan beberapa hal lain.

d. Menaikkan gaji pegawai

Hal pertama yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz untuk menyelamatkan negara dari tindakan korupsi adalah dengan mensejahterakan bawahannya Umar memutuskan untuk menaikkan gaji mereka, sebagian ada yang diberikan seratus dinar dan ada juga yang diberikan dua ratus dinar perbulan. Ia berpendapat jika semua pejabat merasa cukup dengan gajinya mereka akan lebih konsentrasi dalam melayani masyarakat.

e. Mencegah kebohongan

Umar selalu berusaha untuk memutuskan pangkal keburukan suatu kepemimpinan dengan memberikan peringatan untuk mencegah dari hal-hal yang dapat menggiring kepada kebohongan dan menghindari dari kebohongan dalam mengambil keputusan, baik kebohongan yang berasal dari dirinya maupun kebohongan yang berasal dari bawahannya.

f. Melarang untuk menerima gratifikasi dan hadiah

Umar selalu memperingatkan kepada para pejabat dan pegawainya untuk tidak pernah menuruti keinginan khalifah atau keluarganya terkait pemberian hadiah. Menurutnya, pemberian itu merupakan perbuatan tidak baik.

g. Melarang berlebih-lebihan dan bersifat boros

Banyak sekali ketetapan yang diputuskan oleh Umar bin Abdul Aziz yang memperlihatkan betapa dia sangat berhati-hati dalam penggunaan dana umum kaum muslimin. Oleh karenanya, hal pertama yang dilakukan saat dia diangkat menjadi khalifah adalah menyingkirkan segala fasilitas kekhalifahan.

⁴⁰ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hal. 35.

h. Melarang pejabat terlibat dalam perniagaan

Umar bin Abdul Aziz melarang semua pejabat dan para pegawai melakukan aktifitas perniagaan selama dalam masa tugas mereka. Hal ini disebabkan karena bila mereka terlibat dalam perniagaan, maka akan dikhawatirkan dia akan memberikan pengaruh negatif pada pasar dan membuat sesuatu yang akan berakibat kekacauan.

i. Membuka jalur komunikasi antara pemimpin dan masyarakat

Keberadaan beberapa pengawal yang biasanya mengelilingi khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz telah menghalangi masyarakat untuk mengadu atau menyampaikan sesuatu kepada pemimpin mereka. Lain halnya ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, dia bahkan menjanjikan hadiah dan memberikan sejumlah uang bagi siapa yang melapor kepadanya tentang keadaan sesungguhnya. Atau menunjukkan sesuatu kepadanya yang dapat memberikan kemaslahatan bagi negara dan masyarakat umum. Umar bin Abdul Aziz kerap memerintahkan kepada para pejabatnya untuk membuka jalur komunikasi antara mereka dengan masyarakat agar mereka dapat mendengar keluhan dari masyarakat dan mengetahui keadaan mereka.

j. Manajemen Baitul Mal

Tidak lama setelah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, dia memerintahkan penahanan terhadap mantan gubernur Khurasan, Yazid bin Mahlab. Ketika Yazid disidangkan Umar menanyakan tentang dana yang diberikan oleh khalifah sebelumnya Sulaiman bin Abdil Malik. Yazid mengatakan *“Seperti engkau ketahui aku memiliki tempat khusus disisinya, aku selalu melaporkan apapun kepadanya dan aku adalah orang yang paling didengar dan dipercayai olehnya. Sepanjang pengetahuanku, dia tidak pernah mengambil apapun dari negara dan tidak pernah melakukan apapun yang tidak aku sukai”*. Kemudian Umar berkata *“aku tidak ada pilihan kecuali memenjarakanmu”*. Umar bin Abdul Aziz selalu mencari informasi tentang bawahannya, dia mengawasi mereka dan memberi perhitungan apabila terjadi kesalahan dari mereka.⁴¹

k. Menjunjung tinggi prinsip keadilan

Umar bin Abdul Aziz telah menempatkan prinsip keadilan pada tempat yang sebenarnya. Menurut pendapatnya, tanggung jawab dan kekuasaan itu sebenarnya melaksanakan hak-hak rakyat, tunduk pada syarat-syarat *baiat* mereka, serta mewujudkan kemaslahatan bagi mereka. Seorang khalifah adalah

⁴¹Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hal. 355-359.

pelayan umat dan dia harus melaksanakan tuntutan mereka dengan adil sesuai dengan syarat-syarat *baiat*.

Ada banyak hal yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam untuk menegakkan keadilan, seperti mengembalikan hak kepada yang berhak, memberhentikan gubernur yang terindikasi bersifat zalim, menghentikan kezaliman terhadap kaum Mawali, menghapus *al-makas* (retribusi), mengembalikan harta yang didapat secara zalim dan membayar zakat. Umar bin Abdul Aziz mengembalikan semua harta yang didapat secara zalim yang ada diseluruh Baitul Mal dan mengambil zakatnya untuk satu tahun saja.⁴²

1. Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Persamaan

Umar bin Abdul Aziz telah mempraktikkan prinsip persamaan derajat ini pada masa kepemimpinannya. Indikator pertama yang menunjukkan bahwa dia sangat berambisi untuk menerapkan prinsip persamaan ini adalah ketika dia bersumpah bahwa dia sangat ingin menyamakan kehidupannya dan kerabatnya dengan kehidupan kaum muslimin yang lainnya. Umar bin Abdul Aziz ingin menerapkan prinsip persamaan derajat bagi kaum muslimin dalam hak dan kewajiban mereka dalam seluruh sektor kehidupan. Dia tidak memberikan hak istimewa bagi pejabatnya, dia juga tidak memberikan kepada siapapun apa-apa yang bukan haknya. Umar menyamakan hak para pembesar Bani Umayyah dengan hak kaum Muslimin seluruhnya.

Dengan demikian, politik ekonominya berlandaskan pada prinsip persamaan. *Baitul Mal* adalah hak kaum muslimin seluruhnya. Umar bin Abdul Aziz telah menerapkan prinsip persamaan di antara kaum muslimin sampai pada perkara-perkara umum.

m. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan merupakan salah satu prinsip utama di dalam hukum pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Prinsip ini memberikan jaminan kebebasan bagi seluruh umat manusia di bawah naungan syariat Islam, selama kebebasan itu tidak bertentangan dengan syariat.

Prinsip kebebasan pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dapat dilihat dari adanya kebebasan berfikir dan beragama, kebebasan berpolitik, kebebasan individu, kebebasan berniaga dan bekerja.⁴³ Kebebasan berpolitik dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *pertama*, keikutsertaan dalam memilih pemimpin melalui *ahlu al-hilli wa al- 'aqdi*, baiat dari kaum muslimin, dan

⁴²Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hal. 45-56.

⁴³Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hal. 61-66.

keridhaan mereka terhadapnya; *kedua*, menyatakan pendapat dan nasihat terhadap para pemimpin, serta kritikan terhadap pekerjaan mereka dengan pertimbangan hukum Islam.

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa sistem kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz merupakan sebuah sistem kepemimpinan yang menerapkan prinsip *Good Governance* yang sesungguhnya, yaitu dengan menegakkan keadilan, mengutamakan prinsip musyawarah, menjunjung tinggi kesamaan derajat, memberikan kebebasan kepada rakyat dan adanya tanggung jawab atas kekuasaan yang dipegangnya. Pada masa kepemimpinannya, Umar bin Abdul Aziz juga melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap jalannya roda kepemimpinan, perencanaan dan pengawasan yang dilakukannya ini meliputi urusan-urusan yang kecil hingga besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah Bani Umayyah yang berusaha menghidupkan kembali ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Dalam sistem kepemimpinannya, Umar berusaha mengangkat gubernur yang terpercaya, membuat perencanaan dan tujuan yang jelas serta melakukan pengawasan terhadap jalannya roda kepemimpinannya. Di antara upaya Umar bin Abdul Aziz dalam menjalankan *Good Governance* terlihat dalam praktik-praktik kepemimpinan yang dilakukannya, seperti menegakkan keadilan, menjalankan prinsip musyawarah, mempraktikkan prinsip persamaan derajat, menerapkan prinsip kebebasan dan bertanggungjawab terhadap kekuasaan yang dipikulnya. Sehingga semua prinsip tersebut mampu membawa kehidupan kaum muslimin kepada sebuah pembaharuan.

Di antara tantangan yang dihadapi oleh Umar bin Abdul Aziz pada masa kepemimpinannya adalah terjadinya pemberontakan dari kalangan Syiah dan Khawarij. Namun di dalam penyelesaian masalah, Umar lebih mengedepankan metode dialog dan diskusi dengan mereka, sehingga ditambah dengan dukungan dan partisipasi para ulama dan kaum muslimin, semua pemberontakan dapat diatasinya.

Dengan demikian, kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* selayaknya menjadi masukan bagi pemerintah untuk melaksanakan prinsip *good governance* dalam setiap praktik kepemimpinan. Tulisan ini juga membuktikan bahwa pelaksanaan prinsip *good*

governance yang sesungguhnya akan membawa pada perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penerapan prinsip *good governance* benar-benar diterapkan dalam setiap praktik kepemimpinan yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Abdul Karim. *Kitab Sejarah Terlengkap Para Sahabat Nabi, Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in*. Jember: Diva Press, 2014.
- Abdussuyafi Muhammad Abdul Latif. *Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*. Terj. Masturi Irham dan Malik Supar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ali Muhammad Ash-Shallabi. *Biografi Umar bin Abdul Aziz*. terj. Chep. M. Faqih FR. Jakarta: Beirut, 2014.
- Ali Muhammad Ash-Shallabi. *Umar bin Abdul Aziz Pembaharu dari Bani Umayyah*, terj. Shoufau Qolbi. Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2010.
- Ali Nurdin. *Qur'anic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur'an*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006.
- Dwi Martini. *Konsep, Strategi dan Implementasi Good governance dalam Pemerintahan*. Jakarta: IRJEN DEPAG RI, 2007.
- Fahsin M. Fa'al. *Sejarah Kekuasaan Islam*. Jakarta Barat: Artha Rivera, 2008.
- Khatib Pahlawan Kayo, RB. *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Komaruddin Hidayat, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Cet III. Jakarta: ICCE, 2007.
- Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Samsul Munir Amin. *Sejarah Peradaban Islam*. Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Amzah, 2010.
- Sunaryo. *Implementasi Good Governance dan Clean Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jakarta: IRJEN DEPAG RI, 2007.
- Yunasril Ali. *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Angkasa, 2008.